

## Resesi Dan Dampaknya Terhadap Perbankan Syariah Indonesia

Nabila Kurnia Pangestuti<sup>1</sup>, Bahtiar Effendi<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Email: [nabilakurniapangestuti@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:nabilakurniapangestuti@mhs.uingusdur.ac.id)<sup>1</sup>

[bahtiar.effendi@uingusdur.ac.id](mailto:bahtiar.effendi@uingusdur.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRAK:** *Post Covid 19, Indonesia's and the world's economy has decreased. This is due to the ongoing conflicts in the Middle East such as the Israeli and Palestinian wars and the war between Russia and Ukraine. Experts have explained theories that might be able to overcome problems in the potential for economic decline. Previously, Indonesia had also experienced economic crises such as during Covid 19 and the 1997/98 crisis, even the global financial crisis in 2008/2009 which caused conventional banks and Islamic banks to experience bankruptcy. This paper aims to analyze the readiness of Islamic Banks in facing a potential recession. The method that the author uses is a qualitative research method with a literature review which provides output and description of existing data. The result of this writing is the discovery of the readiness of Islamic Banks to face a recession in the year is fairly mature, the problem of NPF also affects Islamic banks, the majority of financing in banks also has an impact on related Islamic banks, let alone the problems of the customer's business which results in non-current installment payments to the Islamic bank. So from this discussion, the role of the government is very reliable in the issue of recession.*

**Keywords:** *Islamic Banks; Recession; Economy; Financing; MSMEs.*

**ABSTRAK:** *Pasca Covid 19 Ekonomi di Indonesia bahkan dunia mengalami penurunan. Ini karena terjadinya konflik yang berkelanjutan di Timur Tengah seperti Perang Israel dan Palestina juga Perang antara Rusia dan Ukraina. Para pakar telah menjelaskan teori-teori yang mungkin saja bisa untuk mengatasi permasalahan pada terjadinya potensi penurunan ekonomi. Sebelumnya di Indonesia juga pernah mengalami krisis ekonomi seperti saat Covid 19 dan krisis tahun 1997/98, sekalipun krisis keuangan global pada 2008/2009 yang menyebabkan bank konvensional maupun bank syariah mengalami kebangkrutan. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Bank Syariah dalam menghadapi potensi terjadinya resesi. Metode yang penulis gunakan yaitu dengan metode penelitian kualitatif dengan literatur review yang mana memberikan output serta penjabaran terhadap data yang ada. Hasil dari penulisan ini yaitu penemuan terhadap kesiapan Bank Syariah menghadapi resesi pada tahun terbilang matang, permasalahan mengenai NPF juga berimbas kepada bank syariah, mayoritas pembiayaan pada bank juga berdampak pada bank syariah terkait, apalagi problem dari usaha nasabah yang mengakibatkan tidak lancarnya pembayaran angsuran kepada bank syariahnya. Maka dari pembahasan ini peran pemerintah sangat diandalkan dalam adanya isu resesi tersebut.*

**Kata Kunci:** *Bank Syariah; Resesi; Ekonomi; Pembiayaan; UMKM*

### PENDAHULUAN

Sebagian besar negara telah kembali mengalami pertumbuhan positif dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Pemulihan ekonomi ini sejalan dengan mobilitas dan aktivitas sosial yang jauh lebih santai dibandingkan pada waktu yang sama tahun lalu, ketika kasus pertama ditemukan. Peningkatan investasi dan peningkatan konsumsi rumah tangga menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi. Seiring dengan

realisasi belanja komoditas dan program bansos, konsumsi pemerintah juga meningkat. Kinerja ekspor Indonesia juga membaik seiring meningkatnya permintaan dari mitra dagang. Semua industri juga telah melanjutkan pertumbuhan positif, dengan penginapan, makanan dan minuman, serta transportasi dan pergudangan mengalami ekspansi terbesar. Namun, mengingat sektor primer kawasan ini terus mengalami tekanan, pertumbuhan Bali Nusra's masih terkendala (Bappenas RI, 2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati SE MSc PhD mengatakan kondisi perekonomian dunia sedang tidak baik. Hal ini tercermin dari kemungkinan terjadinya resesi ekonomi yang menjadi momok menakutkan bagi semua bangsa, termasuk Indonesia (Market, 2022). Selain itu, perang geopolitik antara Ukraina dan Rusia, pengetatan likuiditas, dan inflasi yang tinggi semuanya berkontribusi pada penurunan ekonomi dunia yang terus berlanjut. IMF memprediksi ekonomi Indonesia akan terus berkembang hingga 5,3% tahun ini dan 5% pada 2023, yang tampaknya cukup melegakan Indonesia (Sahda, 2022). Indonesia menikmati "berkah" komoditas selama epidemi 2020–2022. Pasalnya, ekspor komoditas Indonesia ke sejumlah negara mengalami lonjakan harga di saat pasokan global langka dan permintaan tinggi. Hal itu ditunjukkan oleh ekspor Indonesia yang meningkat sebesar 25,31 persen pada Januari 2022. (yoy). Alhasil, ekspor pada Januari 2022 mencapai 19,16 miliar dolar AS (Anggaran, 2022). Selain Menteri Keuangan Republic Indonesia ada juga Prof. Dr. H. Detri Karya, S.E., M.A. yaitu Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Riau, beliau menyatakan resesi ekonomi mulai mempengaruhi perekonomian Indonesia pada akhir tahun 2022.

Sementara itu, aktivitas ekonomi global yang menurun akibat perang menciptakan ancaman baru terhadap stabilitas keuangan. Banyak negara saat ini sedang mengalami resesi dan kesulitan ekonomi sebagai akibat dari dampak pandemi ini. Peran industri perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan pada akhirnya akan dipengaruhi oleh efek perang timur tengah pada berbagai aktivitas ekonomi (produksi dan konsumsi). Rasio kecukupan modal (CAR), likuiditas, dan ekuitas, serta pertumbuhan pendanaan dan rasio pendanaan (FDR). kualitas aset, operasi, hubungan pelanggan, dan margin bunga bersih (NIM). Karena itu, regulator telah mengumumkan inisiatif seperti restrukturisasi kredit OJK dan pelonggaran pelaporan berkala. Selain itu, Bank Indonesia juga ingin menurunkan suku bunga 4,5% sebesar 50 basis poin pada 2020. Sebaliknya, Lembaga Penjamin Simpanan mulai menurunkan pembayaran premi mulai Juli 2020 (Kumaidi & Padli, 2021).

Sektor UMKM sangat terpukul oleh krisis global. UMKM biasanya mengalami dua jenis dampak: finansial dan non-finansial. Menurunnya pendapatan merupakan masalah keuangan yang dialami UMKM akibat Covid-19. Sebagai akibat dari pendapatan dan margin yang lebih rendah, muncul masalah baru mengenai biaya non-variabel atau tetap. UMKM berjuang untuk menutupi biaya non-variabel mereka karena penurunan pendapatan dan margin (Nur Aziz Br Tarigan et al., 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka tujuan dari adanya penulisan ini yaitu untuk menganalisis mengenai resesi dan dampaknya terhadap perbankan syariah di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Analisis ini ditulis dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, dan di dalamnya terdapat kajian pustaka yang memberikan keluaran atas data yang telah dikumpulkan. Selain itu juga mengelaborasi suatu temuan sehingga dapat dijadikan model bagi kajian penelitian lain ketika menyusun atau membuat pembahasan yang jelas tentang isi permasalahan yang perlu dikaji. Untuk memberikan landasan yang kokoh bagi pembahasan atau isi, penulis mencari informasi atau bahan pustaka dari buku, jurnal, atau artikel serta referensi dari sumber-sumber tersebut. Dari penelitian ini adapun isi terkait dengan penggunaan metode penelitian *systematic literature review* Dalam penggunaan penelitian yang dipilih yaitu mengenai resesi dan dampaknya terhadap perbankan syariah di Indonesia. Untuk menghasilkan hasil akhir yang memuaskan dan sesuai dengan harapan, penulis mencari dan mengumpulkan sejumlah jurnal, membuat sejumlah kesimpulan, dan kemudian menyelidiki secara menyeluruh satu per satu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi Bank Syariah**

Bank Islam atau lebih dikenal dengan bank syariah adalah bank yang tidak menggunakan sistem bunga dalam operasional sehari-harinya. Bank syariah adalah mereka yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam, atau aturan yang ditetapkan dalam Quran dan hadits Nabi. Menerima simpanan, meminjamkan uang, dan menawarkan layanan pengiriman uang adalah tiga tugas utama yang dilakukan oleh lembaga perbankan. Sistem perbankan telah ada sepanjang sejarah perekonomian umat Islam sejak zaman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, sedangkan pembiayaan yang dilakukan melalui akad syariah telah menjadi tradisi umat Islam sejak zamannya. Sejak zaman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, kebiasaan termasuk menerima simpanan, meminjamkan uang untuk penggunaan pribadi dan profesional, dan mengirim uang telah meluas. Alhasil, ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam masih hidup, tiga tugas utama perbankan modern menerima simpanan, mengarahkan dana, dan melakukan transfer uang telah hadir dalam kegiatan ekonomi. (Agustin, 2021). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah merupakan landasan hukum berikutnya bagi bank syariah yang masih berlaku hingga saat ini. Aturan tunggal ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana fungsi bank syariah. Macam-macam perusahaan, aturan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah, bagaimana uang didistribusikan, kelangsungan bisnis, dan sejumlah hal yang harus dihindari oleh bank syariah semuanya diatur dengan hati-hati (Admin, 2021).

Dalam Bank Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Islam Indonesia (DSN-MUI) berguna untuk menjaga konsistensi penyelenggaraan kegiatan perbankan berdasarkan syariat Islam dan sebagai penanggung jawab dalam perbankan syariah. Dalam UU No.21 tahun 2008 tersebut disebutkan bahwa MUI harus diberi peringatan untuk mengeluarkan fatwa syariah tentang produk keuangan apapun melalui DSN-MUI. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur bahwa semua produk perbankan syariah hanya dapat tersedia untuk masyarakat umum setelah menerima

fatwa DSN-MUI dan izin OJK, DSN-MUI dan OJK juga berkontribusi terhadap perkembangan bank Syariah (OJK, 2021).

### **Resesi**

Resesi ialah Permintaan barang yang lebih rendah sehingga mengurangi lowongan kerja dan tingkat pencarian kerja semakin sulit. resesi yang diukur dengan beberapa indikator ekonomi. Kebijakan moneter dapat membantu baik krisis maupun resesi berubah menjadi lebih baik dengan mengeluarkan seperangkat peraturan kebijakan moneter yang mencapai keseimbangan antara perlunya fleksibilitas kebijakan dalam keadaan yang unik. Ekonomi dunia, bagaimanapun, tidak stabil seperti yang diantisipasi, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tidak memberikan manfaat yang cukup bagi kaum miskin dunia. Dibandingkan dengan krisis tahun 1997–1998, perekonomian Indonesia jauh lebih tahan terhadap bencana yang baru saja terjadi. Meskipun krisis keuangan global tahun 2008–2009 tidak mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi melainkan perlambatan, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang sebenarnya sedikit lebih tinggi dari yang seharusnya. Dengan demikian, Indonesia dapat menghadapi pandemi Covid-19 kali ini dengan segala bahayanya, termasuk keterpurukan ekonomi (Ravn & Sterk, 2017). Krisis ini menyebabkan masalah likuiditas dan penurunan nilai aset, yang pada gilirannya memperburuk krisis. Berbagai inisiatif untuk mengatasi masalah ini telah dikoordinasikan oleh para pemimpin politik dunia, namun krisis tetap ada. Krisis subprime mortgage di Amerika Serikat yang kemudian menjalar ke perbankan global dan krisis ekonomi menjadi akar penyebab krisis ini (Ali, 2009).

### **Ancaman Resesi terhadap Perekonomian Indonesia**

#### **1. Ancaman terhadap Perbankan Syariah**

Sejak Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, yakni system dual banking, pertumbuhan rata-rata perbankan syariah di dalam negeri sangat pesat. Di satu sisi, hal ini sangat menggembirakan bagi semua pihak, khususnya umat Islam Indonesia, namun jika kita mencermati ekspektasi total volume bisnis perbankan syariah di tahun 2011 seperti dilansir Bank Indonesia sebesar Rp, kegembiraan tersebut bisa berubah menjadi sebaliknya. Angka 27 triliun itu sebenarnya hanya 1,6 persen dari seluruh transaksi perbankan konvensional dan syariah, atau 2:96 dari seluruh transaksi (Subandi, 2012).

Lembaga keuangan Islam dapat diandalkan dan terus membantu pemegang saham, pemegang sekuritas, peminjam, dan deposan di bank Islam dengan keuntungan, kemudahan, dan keamanan. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa bank Muamalat mampu melewati krisis keuangan tahun 1998 dengan kinerja yang meningkat dan tanpa bantuan pemerintah, bahkan mampu menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 300 miliar selama krisis keuangan 2008. Keuangan Islam benar-benar dapat memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar tahan terhadap krisis, kebal terhadapnya, dan mampu berkembang pesat. Oleh karena itu, diperlukan tindakan strategis untuk mewujudkannya (Marimin et al., 2015).

Adanya konflik perang antara Rusia Ukraina dan Palestina Israel ikut berimbas pada potensi krisis bagi bank syariah. Namun demikian, di tengah ketidakpastian saat ini,

masih terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk terus tumbuh (Kumaidi & Padli, 2021), yaitu:

- a. Secara historis, bank syariah terbukti lebih tahan krisis daripada bank tradisional. Bank syariah adalah satu-satunya bank yang selamat dari krisis keuangan tahun 1998, menurut pengalaman krisis tersebut.
- b. Karena struktur bagi hasil mereka, bank syariah seringkali tahan terhadap krisis. Penggunaan akad mudharabah dan musyarakah menunjukkan sistem ini. Kontrak berdasarkan musyarakah dan mudharabah biasanya menyerap risiko. Hal ini tentu berbeda dengan pemikiran bank konvensional yang seringkali mengandalkan bunga sehingga memungkinkan untuk menaikkan biaya bunga yang dikeluarkan saat krisis.
- c. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk pertumbuhan keuangan pada lembaga syariah. Dengan 80% dari 254,9 juta total populasinya adalah Muslim, Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia.
- d. 72% masyarakat Indonesia tertarik untuk go digital, dilihat dari data Accenture Global Financial Services Consumer Study. Lingkungan pandemi yang membatasi mobilitas manusia menjadi salah satu faktor penyebab digitalisasi tersebut. Tidak semua sektor ekonomi menderita selama pandemi ini.

## **2. Ancaman Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah**

Bank adalah badan hukum yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat luas, menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Weston, 2012).

Apabila nasabah tidak lagi dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban yang telah digariskan dalam perjanjian pembiayaan dengan bank, maka hal tersebut disebut sebagai non-performing finance (NPF). Karena kesulitan keuangan klien, inilah penjelasannya. Karena terdapat kerawanan baik dari pihak internal debitur yaitu Bank maupun pihak eksternal debitur yaitu Bank, Non Performing Finance (NPF) juga dapat disebabkan oleh satu atau beberapa faktor yang harus diakui oleh pejabat pembiayaan. (Sa'diyah, 2019).

Seperti kredit macet bank tradisional, pembiayaan bermasalah (NPF) dihasilkan dari masalah yang muncul selama proses persetujuan bank untuk pembiayaan atau setelah pembiayaan diberikan. NPF dan NPL, bagaimanapun, terjadi di banyak sistem. Aspek fundamental dari sistem perbankan syariah dapat menghentikan munculnya dan penyebaran NPF, sedangkan sistem perbankan konvensional menawarkan lebih banyak peluang terjadinya NPL (Rafsanjani et al., 2017). Jenis pembiayaan modal kerja yang digunakan pada bank umum syariah menganut sistem bagi hasil dimana resiko yang dialami debitur merupakan resiko bersama yang akan ditanggung oleh bank, sehingga pembiayaan dengan jenis pembiayaan ini lebih dominan dari segi besaran. NPF yang terjadi. Jenis pembiayaan konsumsi merupakan jenis pembiayaan yang memberikan kontribusi paling kecil terhadap tingkat NPF pada bank umum syariah, disusul jenis pembiayaan investasi sebagai jenis pembiayaan terbesar kedua.

Merupakan praktik umum untuk menggunakan restrukturisasi pembiayaan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah guna membantu klien atau anggota dalam memenuhi kewajibannya. Ini termasuk 1) penjadwalan ulang, 2) rekondisi, dan 3) restrukturisasi (Sa'diyah, 2019). Solusi lain yang juga seringkali dilakukan dalam bank syariah yaitu dengan cara menambah modal melalui rights issue dengan mengundang investor baru maupun sekuritisasi kredit milik Bank Muamalat. Namun upaya tersebut sebenarnya belum bisa menjadi solusi, dikarenakan hal tersebut menjadikan adanya lonjakan baru terhadap NPF. Akibatnya tidak menutup kemungkinan adanya peningkatan NPF itu sendiri.

### **3. Mayoritas Penyaluran Pembiayaan Bank yang Ikut Terdampak pada Kondisi Perbankan**

Banyak negara khawatir resesi mereka akan memburuk menjadi depresi. Untuk memberikan kemudahan administrasi (izin) dan perpajakan bagi pemilik modal (pemodal) untuk menanamkan modalnya, negara mengeluarkan beberapa kebijakan. Kawasan industri dibangun di seluruh dunia untuk memfasilitasi investasi pemilik modal. Begitu pula dengan peningkatan infrastruktur. Tujuannya adalah untuk menjaga ekonomi yang sehat dan memastikan bahwa orang memiliki akses ke uang untuk menjaga daya beli mereka. Karenanya, negara senantiasa mengawasi pengeluaran rumah tangga sebagai tanda bahwa daya beli tetap terjaga. Ternyata, pengeluaran rumah tangga di Indonesia mencapai sekitar 55% dari total pengeluaran nasional. Pengeluaran oleh rumah tangga untuk mendukung tren ekonomi Indonesia saat ini (Miraza, 2019).

Bank syariah dan bank konvensional sama-sama akan menghadapi kondisi penyaluran kredit (funding) yang sama yaitu terjadi penurunan penyaluran kredit (financing). Perbankan syariah diharapkan memiliki keunggulan dibandingkan perbankan konvensional, seperti POJK No.11/POJK.03/2020 dapat membantu bank syariah dan konvensional dalam memberikan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Last but not least, aspek yang paling khas dari perbankan Islam adalah sistem bagi hasil yang digunakannya (Iqbal, 2021). Akibatnya, neraca bank syariah akan berada dalam kondisi yang fleksibel selama krisis pandemi ini karena tingginya biaya yang terkait dengan pembayaran bagi hasil akan menurun seiring dengan penurunan pendapatan mereka. Sebaliknya, bank konvensional tidak menurunkan suku bunga yang dikenakan kepada deposan ketika pendapatan mereka dari bunga kredit menurun. Hal tersebut lah yang menjadi permasalahan serius dari bank konvensional di masa pandemi ini.

Pemerintah harus menggenjot penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mengatasi kerugian akibat bahaya resesi (APBN). Untuk menarik arus modal segar yang dibutuhkan sektor real estate, peningkatan efektivitas dan daya saing iklim usaha nasional juga penting. Pemerintah dapat berkonsentrasi untuk memberikan stimulus kepada masyarakat umum dan pelaku korporasi, yang akan meningkatkan kemauan mereka untuk berbelanja. Untuk mendorong ekspansi perusahaan, pemerintah juga harus menawarkan fasilitas kepada pelaku usaha seperti izin ekspor dan bantuan restrukturisasi modal. Selain itu, dukungan terhadap

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu mendapat perhatian (Febrianto & Rahadi, 2021).

Ternyata meskipun UMKM memberikan kontribusi yang relatif positif terhadap perekonomian nasional, namun industri ini masih menghadapi berbagai persoalan yang sangat mendasar. UMKM terus kekurangan keterampilan manajemen bisnis yang memadai, akses ke lembaga keuangan, khususnya bank, dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas tinggi. Menurut penelitian Urata sebelumnya, "salah satu masalah utama yang dihadapi UMKM adalah banyaknya UMKM yang belum bankable, baik karena pengelolaan keuangan yang kurang transparan maupun kemampuan manajerial dan keuangan yang kurang." Pernyataan ini mendukung klaim tersebut (Adawiyah, 2014).

Peran pemerintah diperlukan untuk mengatasi kerugian dari ancaman resesi, khususnya pemerintah perlu meningkatkan daya serap. Berbagai program pemulihan bagi dunia usaha juga terus dilakukan pemerintah agar pelaku usaha tetap bertahan. Pemerintah menyiapkan dukungan bagi dunia usaha melalui koordinasi yang erat dengan BI dan OJK dengan industri perbankan Nasional, untuk berbagai sektor usaha, sektor bisnis, sektor real estate, dan sektor usaha lainnya.

#### **4. Problem Usaha Dan Solusi**

Indikator perbankan nasional pasca deregulasi menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dari sisi kuantitas. Perbankan nasional, bagaimanapun, tidak dapat dipisahkan dari sifat perbankan yang tidak stabil, seperti halnya lembaga perbankan pada umumnya. Jika bank tidak dikelola dengan hati-hati dan sehat, kerapuhan akan kembali meningkat. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang perbankan Indonesia sebelum krisis dalam hal ini (Sugema & Simorangkir, 2022).

Tentunya pasti ada hal yang melatar belakangi adanya suatu permasalahan. Usaha dari nasabah sendiri adakalanya naik dan turun sesuai dengan keadaanya. Apabila nasabah yang awalnya selalu teratur dalam pembayaran angsuran dan tiba-tiba mengalami perubahan dengan tidak lancarnya pembayaran, hal itu juga bisa dikarenakan nasabah lebih mementingkan kebutuhan yang lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan usaha nasabah menurun bahkan bangkrut dikarenakan mengalami problematika. (1) ketidakmampuan dalam memajemen, (2) pengetahuan nasabah yang terbatas, (3) informasi yang kurang memadai, (4) pesaing pasar ketat, dan (5) ketidakmampuan dalam mengembalikan modal pinjaman yang mengakibatkan usaha tersebut menurun dan tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan kurangnya pemasukan.

Solusi atas problem dari usaha nasabah ini yaitu seperti dengan cara:

- a. Nasabah lebih bisa mempertimbangkan hal yang menjadi prioritasnya, sehingga hal yang tidak diinginkan tidak mengancam usahanya.
- b. Nasabah harus membuka relasi sebanyak mungkin untuk mencari mangsa pasar yang sedang marak, entah dari digital marketingnya maupun pasar tradisonalnya.
- c. Nasabah harus banyak mencari informasi mengenai usaha yang dibawah, karena jika tidak dilandasi dengan pengetahuan usaha tersebut akan hancur tak terarah.

## **5. Peran Kebijakan Pemerintah Dalam Menghadapi Resesi**

Sistem ekonomi dunia telah berubah karena pesatnya perkembangan teknologi, bergerak menuju ekonomi digital dan perkembangan keuangan. Akibat pembatasan sosial yang meluas dan kebijakan work from home (WFH), transaksi internet terus meningkat pesat, terutama di masa pandemi Covid-19 (PSBB). Melalui pengelolaan yang efektif dari resesi yang akan datang pada tahun 2023, kebijakan fiskal berdampak besar pada produktivitas UMKM. (Blandina et al., 2020).

Pengaruh kebijakan fiskal menjadi dua kategori yaitu pengaruh pada sisi penawaran dan pengaruh pada sisi permintaan (demand side effect) (efek samping penawaran). Pengaruh kebijakan fiskal pada sisi penawaran memiliki dampak jangka panjang. Kebijakan fiskal yang difokuskan pada perluasan sisi penawaran dapat mengatasi persoalan kapasitas produksi yang terbatas sehingga berdampak jangka panjang (Amin, 2021).

Jika dilihat dari data dan juga isu yang beredar (Bappenas RI, 2021), Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan pemerintah akan menggunakan tiga strategi untuk mengatasi ancaman resesi pada (Putri & Hidayat, 2022) yaitu sebagai berikut:

1. Memanfaatkan secara maksimal penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 275 juta jiwa, diperlukan strategi yang fokus pada ekonomi domestik dan memberdayakan ekonomi domestik yang sangat besar. Dengan demikian, program Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang bertujuan memperkuat produk lokal tetap didukung. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor, pemerintah juga akan terus mendukung industri berbasis sumber daya alam (SDA).
2. Pengendalian inflasi, terutama yang disebabkan oleh pangan. Iskandar mensinyalir penyebab utama inflasi di Indonesia adalah kenaikan harga pangan. Oleh karena itu, upaya untuk mendorong penanaman kebun dan food estate serta peningkatan produktivitas dan mempersingkat masa tanam akan terus dilakukan. Dikombinasikan dengan inisiatif untuk memudahkan kerja sama daerah dan menekan biaya pengiriman barang.
3. Perbaiki iklim investasi dengan penerapan online single submission secara penuh di seluruh Indonesia.

Sasaran kebijakan moneter Bank Indonesia adalah diperuntukkan untuk menjaga stabilitas. Sementara itu, 5 (empat) kebijakan tambahan Bank Indonesia, yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan ekonomi keuangan yang hijau dan inklusif, akan tetap dilaksanakan dalam upaya mempercepat perekonomian negara. pemulihan (pro-pertumbuhan). Berikut penjelasan masing-masing kebijakan:

### **1. Kebijakan Moneter**

Pada tahun 2023, kebijakan moneter Bank Indonesia akan dipusatkan untuk mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi agar kembali ke sasaran semula sebagai langkah mitigasi terhadap merebaknya dampak gejolak global. Untuk memastikan sasaran inflasi inti tercapai lebih awal—khususnya pada semester I 2023—Bank

Indonesia akan senantiasa mempertahankan respons kebijakan suku bunga melalui komunikasi yang terkalibrasi, terencana, dan terkomunikasikan dengan baik. Berdasarkan perubahan inflasi inti dan ekspektasi inflasi relatif terhadap proyeksi dasar dan tujuan yang ingin dicapai, ukuran dan waktu reaksi kebijakan suku bunga ditentukan (tergantung data).

2. Kebijakan Makroprudensial  
Selama stabilitas sistem keuangan terjaga dan ekonomi hijau serta inklusi keuangan dikembangkan, kebijakan makroprudensial yang longgar akan terus mendukung kredit dan pembiayaan perbankan kepada industri prioritas dan UMKM.
3. Kebijakan Sistem Pembayaran  
Dalam rangka percepatan integrasi ekonomi dan keuangan digital, kerjasama sistem pembayaran antar negara, serta tahapan pembangunan Rupiah Digital sebagaimana dalam “white paper” yang juga diluncurkan di PTBI 2022, digitalisasi sistem pembayaran berbasis Indonesia 2025 Cetak Biru Sistem Pembayaran (BSPI) yang satu bahasa, satu bangsa, dan satu nusantara terus digenjut.
4. Kebijakan Pendalaman Pasar Uang  
Meningkatkan efektivitas operasional dan transmisi kebijakan, mengembangkan pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta mengembangkan instrumen pembiayaan antara lain pengembangan keuangan berkelanjutan, percepatan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing sesuai Cetak Biru Pengembangan Pasar Uang 2025 ( BPPU) juga dikejar.
5. Kebijakan Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau  
Ekonomi keuangan syariah dan program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif bagi UMKM terus diperluas, antara lain dengan melakukan digitalisasi dan membuka lebih banyak akses ke pasar domestik dan internasional.

## **KESIMPULAN**

Kesiapan Bank Syariah menghadapi resesi terbilang matang, dibuktikan dengan Lembaga keuangan Islam dapat diandalkan dan terus membantu pemegang saham, pemegang sekuritas, peminjam, dan deposan di bank Islam dengan keuntungan, kemudahan, dan keamanan. Namun, adanya permasalahan mengenai NPF yang berimbas kepada bank syariah mengakibatkan terkendalanya pemasukan pada bank syariah tersebut. Pembiayaan modal kerja pada bank umum syariah mengikuti sistem bagi hasil, dimana risiko yang dihadapi debitur merupakan risiko bersama yang akan ditanggung oleh bank. Alhasil, pembiayaan dengan gaya pembiayaan ini lebih mendominasi dari segi jumlah NPF yang terjadi. Mayoritas pembiayaan pada bank juga berdampak pada bank syariah terkait, hal tersebut bisa dilihat dari adanya bank syariah dan bank konvensional yang sama-sama dalam kondisi penyaluran kredit (funding) yang sama yaitu terjadi penurunan penyaluran kredit (financing). UMKM memberikan kontribusi yang relatif positif terhadap perekonomian nasional, namun demikian industri ini masih menghadapi berbagai persoalan yang sangat mendasar. Apalagi problem dari usaha nasabah yang mengakibatkan tidak lancarnya pembayaran angsuran kepada bank syariahnya. Karenanya perkembangan teknologi yang cepat dan pergeseran ke ekonomi digital dan perkembangan keuangan syariah yang masif, serta struktur ekonomi

global diharapkan bisa menjadi faktor yang bisa membantu penguatan terhadap perbankan syariah nasional

### Daftar Pustaka

- Adawiyah, W. R. (2014). Faktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi di Kabupaten Banyumas. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 2(2), 165.
- Admin. (2021). *Landasan Hukum Bank Syariah Yang Wajib Diketahui*. Shafiec. <https://shafiec.unu-jogja.ac.id/2021/03/landasan-hukum-bank-syariah-yang-wajib-diketahui/>
- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67–83. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>
- Ali, N. M. (2009). Krisis Keuangan Global dan Upaya Aktualisasi Ekonomi Islam. *La\_Riba*, 3(1), 24–45. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss1.art3>
- Amin, N. (2021). Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi. *STIE Syariah Bengkalis*, 69–98. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Anggaran. (2022). Ekonomi 2023: Antara Optimistis dan Realistis. In *EMedia DPR RI*. <https://emedia.dpr.go.id/article/ekonomi-2023-antara-optimistis-dan-realistic/>
- Bappenas RI. (2021). *Perkembangan Ekonomi Indonesia Dan Dunia* (Vol. 5, Nomor 2). [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Update\\_Ekonomi/Ekonomi\\_Makro/Perkembangan\\_Ekonomi\\_Indonesia\\_dan\\_Dunia\\_Triwulan\\_II\\_Tahun\\_2021.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Update_Ekonomi/Ekonomi_Makro/Perkembangan_Ekonomi_Indonesia_dan_Dunia_Triwulan_II_Tahun_2021.pdf)
- Blandina, S., Noor Fitriani, A., & Septiyani, W. (2020). Strategi Menghindarkan Indonesia dari Ancaman Resesi Ekonomi di Masa Pandemi. *Efektor*, 7(2), 181–190. <https://doi.org/10.29407/e.v7i2.15043>
- Departemen Komunikasi. (2022). BANK INDONESIA PROYEKSIKAN PERTUMBUHAN EKONOMI 4,5-5,3% DAN INFLASI AKAN KEMBALI KE DALAM SASARAN 3,0±1% PADA TAHUN 2023. *bank Indonesia*.
- Febrianto, L. D., & Rahadi, D. R. (2021). Ancaman Resesi Akibat Covid-19 Terhadap Perusahaan Di Indonesia Recession Threat Due To Covid-19 On Companies In Indonesia. *Jurnal Dimensi*, 10(1), 45–57.
- Iqbal, M. (2021). *Perkembangan Perbankan Syariah Saat ini*. SEF FEB UGM.
- Kumaidi, & Padli, H. (2021). Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 5(2), 146–156. <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/semnasp/article/view/10934>
- Marimin, A., Haris Romdhoni, A., & Nur Fitria, T. (2015). PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA Agus Marimin 1, Abdul Haris Romdhoni 2, dan Tira Nur Fitria 3 STIE-AAS Surakarta 2. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01, 75–87.

- Market. (2022). RI Kebal Dari Resesi 2023, Kata Siapa? Ini Bukti Ngerinya. In *CNBC Indonesia*.
- Miraza, B. H. (2019). Seputar Resesi dan Depresi. *Jurnal Ekonomi KIAM*, 30(2), 11–13. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>
- Nur Aziz Br Tarigan, Z., Dewi, F. N., & Pribadi, Y. (2022). Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi: Dukungan Kebijakan Pemerintah. *JURNAL BPPK*, 15, 12–23.
- OJK. (2021). Perbankan Syariah dan Kelembagaannya. *OJK Tentang Syariah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>
- Putri, R. S., & Hidayat, A. A. N. (2022). Ini 3 Strategi Pemerintah Menghadapi Ancaman Resesi 2023. In *Bisnis Tempo*. [tempo.com. https://bisnis.tempo.co/read/1645908/ini-3-strategi-pemerintah-menghadapi-ancaman-resesi-2023](https://bisnis.tempo.co/read/1645908/ini-3-strategi-pemerintah-menghadapi-ancaman-resesi-2023)
- Rafsanjani, H., Amin, R., & Mujib, A. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non-Performing Financing. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.892>
- Ravn, M. O., & Sterk, V. (2017). Job uncertainty and deep recessions. *Journal of Monetary Economics*, 90(2), 125–141. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2017.07.003>
- Sa'diyah, M. (2019). Strategi Penanganan Non-Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT [Strategy for Handling Non-Performing Finance (NPF) in Murabahah Financing at BMT]. *Conference on Islamic Management Accounting and Economics*, 2, 185.
- Sahda, L. (2022). Ancaman Resesi 2023, UMKM Bisa jadi Solusi Jitu. In *Repoter OJT ITS Online*. <https://www.its.ac.id/news/2022/11/05/ancaman-resesi-2023-umkm-bisa-jadi-solusi-jitu/>
- Subandi, S. (2012). Problem dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah Kontemporer di Indonesia. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v12i1.44>
- Sugema, I., & Simorangkir, I. (2022). PERANAN THE LENDER OF LAST RESORT (LOLR) TERHADAP PEREKONOMIAN: Suatu Kajian Empiris Terhadap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 7(1), 53–88. <https://doi.org/10.21098/bemp.v7i1.98>
- Weston, B. dan. (2012). Kajian Pustaka Dan Pengembangan Hipotesis. *Ste.Ac.Id/*, 2011, 175. [http://repository.stei.ac.id/1213/3/BAB II.pdf](http://repository.stei.ac.id/1213/3/BAB%20II.pdf)